

## Peranan Dinas Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar di Kabupaten Karawang

Andry Yeremia<sup>1</sup> Maulana Rifai<sup>2</sup> Dadan Kurniansyah<sup>3</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat,  
Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [andry.yeremia@gmail.com](mailto:andry.yeremia@gmail.com)<sup>1</sup> [maulana.rifai@staff.unsika.ac.id](mailto:maulana.rifai@staff.unsika.ac.id)<sup>2</sup>  
[dadan.kurniansyah@fisip.unsika.ac.id](mailto:dadan.kurniansyah@fisip.unsika.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan peneliti terhadap masih mudahnya ditemui Anak Terlantar di sudut sudut kota Kabupaten Karawang, dimana Anak yang semestinya masih mendapatkan perlindungan orangtua dan bersekolah sudah harus merasakan hidup di jalanan untuk mencari uang dengan cara mengamen, mengemis hingga berjualan. Dimana stigma masyarakat masih menganggap negatif dengan adanya Anak Terlantar, akan tetapi di sisi lain peran pemerintah diperlukan untuk memperhatikan dan melindungi Anak Terlantar ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi peran Dinas Sosial dalam Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Di kabupaten Karawang. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Data diambil dari narasumber yang ditetapkan berdasarkan sampel nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Rehabilitasi, Kepala Seksi Rehabilitasi Anak Terlantar dan Lanjut Usia. Peneliti menggunakan teori Peranan menurut Levinson yaitu Norma, Konsep, dan Perilaku. Hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya sosialisasi terkait program sehingga menyebabkan program yang Diadakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum mampu mengurangi jumlah Anak Terlantar dan belum mampu merehabilitasi Anak Terlantar sesuai target Dinas Sosial.

**Kata Kunci:** Anak Terlantar, Rehabilitasi Anak Terlantar, Peranan Dinas Sosial

### Abstract

*The study is backed up by researchers' observation of abandoned children in the corner of the city of Khanewal district, where children who should still be given parental protection and go to school must live on the streets to make money by fishing, begging to selling. Where the stigma of society still treats its negative impact on displaced children, however, on the other hand, the role of government is required to observe and protect these displaced children. The purpose of this study was to analyze and identify the role of the Social Service in the Social Rehabilitation of Neglected Children in Karawang district. Researchers used a descriptive method with a qualitative approach. The data collection technique is done by interview, observation, documentation and triangulation. The data were taken from selected sources based on nonprobability sampling with purposive sampling technique. The informants in this study consisted of the Head of Rehabilitation, the Head of the Rehabilitation Section for Neglected Children and the Elderly. . Researchers used the Role theory according to Levinson namely Norms, Concepts, and Behaviors. The results showed that there is still a lack of socialization related to the program, causing the program held by the Social Service of Karawang Regency to not be able to reduce the number of children and not be able to rehabilitate abandoned children according to the target of the Social Service.*

**Keywords:** Neglected Children, Rehabilitation of Neglected Children, Role of Social Service



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Masalah sosial adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial dipandang

oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang begitu cepat meningkat dan berkembang adalah meningkatnya jumlah masyarakat miskin, anak terlantar, gelandangan, pengamen, usia lanjut terlantar, tuna susila, pengemis, anak terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya.

Anak terlantar merupakan masalah sosial, dimana keberadaan mereka sering dirasakan sangat tidak menyenangkan oleh banyak orang, di mata masyarakat, keberadaannya masih dianggap sebagai masalah sosial yang harus disingkirkan. Hal tersebut sesuai dengan sesuai dari definisi menurut Horton dan Leslie (1982) (Suharto, 2010:83) adalah suatu kondisi yang dirasakan oleh banyak orang yang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan sosial secara kolektif.

Untuk bisa melihat keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut perlu juga di lihat kembali, bahwa dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 4 hak dasar, antara lain: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak untuk berpartisipasi. Menyambung Undang – undang Dasar Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adapun UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang mengatur tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang berisi tentang fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh negara, negara mengembangkan sistem jaminan sosial, negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dan mempunyai makna bahwa gepeng dan anak-Anak Terlantar dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dinas Sosial Kabupaten Karawang merupakan organisasi sektor publik daerah yang menjadi pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Anak Terlantar yang telah di Razia oleh Satpol PP kabupaten Karawang yang kemudian di diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karawang dilakukan pembinaan serta bekerjasama dengan Lembaga Kerjasama Sosial (LKS) yang ada di Palimanan. Namun hal ini dinilai masih belum efektif karena Dinas Sosial Kabupaten Karawang pernah mengirimkan 8 Anak Terlantar untuk mengikuti program pelatihan itu akan tetapi belum sampai 6 bulan disana Anak Terlantar ini dilaporkan kabur oleh pihak Lembaga Kesejahteraan Sosial disana. Sehingga program ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kegiatan pemberdayaan keterampilan anak dari tahun 2011 tahun 2013 tidak pernah mencapai target. Karena ada beberapa faktor yang masih menjadi kendala meliputi seperti kurangnya sumber daya manusia di Dinas Sosial Kabupaten Karawang, karakter dari lembaga dan organisasi yang turut mempengaruhi kebijakan, serta masih banyak pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pada umumnya peranan dan peranan pemerintah menurut Tjokroamidjojo (2006:18) sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan (*development agent*) diakui, tetapi caranya bisa dilakukan melalui pimpinan dan pengaturan serba negara, atau pemberian kebebasan pada sektor swasta yang cukup besar, ataupun suatu usaha pembangunan berencana dimana pemerintah memberikan peranan dalam pengarahan serta melakukan cara-cara langsung (dengan menggunakan banyak upaya melalui mekanisme pasar/harga) untuk merangsang perkembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat luas.

Peranan serta fungsi pemerintah juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu negara. Perencanaan itu sendiri merupakan pernyataan peranan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi (Tjokroamidjojo, 2006:20). Dalam Soekanto (2017:210) peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.

Peranan (Soekanto, 2017:211) yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Menurut Levinson (Soekanto, 2017:211) mengatakan, peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Znaniacki (Soekanto, 2017:212), bahwa setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut, atau, ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Apabila nilai sosial tersebut tidak dapat terpenuhi oleh individu, terjadilah *role-distance*. Menurut Marion J. Levy (Soekanto, 2017:213-214), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 2006:18) dapat juga dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan bahkan seringkali fungsi penarikan pajak tidak diabdikan kepentingan rakyat. Ini adalah peranan pemerintah yang paling tradisional.

2. Kemudian timbul pengertian tentang *Service State*, di mana peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang diatur dalam masyarakat. Hal ini juga didasari oleh banyak pikiran-pikiran mengenai *Welfare State* atau negara pikiran-pikiran mengenai *Welfare State* atau Negara kesejahteraan.
3. Kemudian terdapat pula suatu cara dalam pelaksanaan peranan pemerintah yang memberikan kepada pemerintah peranan sebagai enterpreneur atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat, pemerintah menjadi "*development agent*" atau unsur pendorong pembaharuan pembangunan.

Menurut Awaloedin Djamin (Tjokroamidjojo, 2006:18) mengenai cara peranan pemerintah terdapat klasifikasi sebagai berikut:

1. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat di sub-klasifikasi:
  - a. Penentuan kebijaksanaan.
  - b. Pemberian pengarahan dan bimbingan.
  - c. Pengaturan melalui perizinan
  - d. Pengawasan.
  - e. Produk daripada fungsi ini adalah berbagai peraturan-peraturan.
2. Pemikiran sendiri daripada usaha-usaha ekonomi atau sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi atau sosial.

Peranan serta fungsi pemerintah (Tjokroamidjojo, 2006:20) juga berhubungan erat dengan usaha pembangunan berencana suatu Negara. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pernyataan pemerintah dalam kegiatan sosial ekonomi. Menurut Soekanto (2017:214) di Indonesia terdapat kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan ketimbang peranan. Gejala tersebut terutama disebabkan adanya kecenderungan kuat untuk lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2017:137) adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan pengetahuan seluas-luasnya terhadap objek yang sedang diteliti dengan memberikan gambaran, pemaparan dan menceritakan mengenai apa yang dilihat di lapangan. Bertolak pada uraian tersebut, maka metode ini dianggap relevan untuk dipakai dalam penelitian ini. Memperhatikan penjelasan tersebut maka peneliti memakai penelitian kualitatif dalam penelitian peranan Dinas Sosial dalam rehabilitasi anak terlantar di Kabupaten Karawang, karena pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan bersifat kualitatif.

Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang didapatkan oleh peneliti melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber sekunder merupakan data yang diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau berupa dokumen. Data dari informan dapat terus berkembang agar bertujuan (*purposive*), sehingga data harus memuaskan dan peneliti dapat melakukan penghayatan.

Peneliti melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan informan dan masyarakat. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan wawancara semiterstruktur. Menurut Sugiyono (2017 : 233) menyatakan bahwa tujuan wawancara semistruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab ialah yang akan menanyakan dan menjelaskannya kepada informan. Bahan dokumenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya disarankan untuk dokumenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Peneliti ingin menjelaskan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, baik dari segi literatur maupun dari penelitian langsung di lapangan melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan informasi penelitian dan observasi di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisisnya menggunakan teori Levinson dengan prinsip-prinsip peranan yang terdiri dari 3 unsur yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

### **Pembahasan**

Dalam peranan yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dalam Peraturan Bupati karawang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial pada pasal 3 jenis dan penerima pelayanan dasar.

Peranan Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial. Berikut Pernyataan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dra. Dyah sebagai berikut: “kami bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja untuk merazia anak terlantar ini dan diserahkan kepada kami untuk kemudian kami melakukan pembinaan dan pelatihan, pembinaan yang kami lakukan berupa bimbingan moral agar anak terlantar ini mau bersekolah dan mengenyam pendidikan, entah itu pendidikan formal ataupun nonformal. Adapun anak terlantar yang sudah mendekati umur dewasa biasanya kami melakukan pelatihan keterampilan agar anak terlantar ini nantinya bisa berwirausaha dan pelatihan ini kami bekerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Palimanan.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh bapak Damanhuri selaku kepala seksi Rehabilitasi Anak Terlantar dan lanjut usia: “kami selalu berupaya untuk melaksanakan aturan yang berlaku dalam mengurangi jumlah Anak Terlantar, hanya saja kendala yang kita temui justru datang dari Anak Terlantar itu sendiri karena mereka ingin mendapatkan uang secara instan, tapi kami selalu berupaya agar anak ini kami rangkul dan kami beri bimbingan agar bisa lepas dari belenggu status sosial yang dia miliki saat ini.”

Berdasarkan wawancara kepada Anak Terlantar Yanu sebagai berikut: “gak tahu a, saya belum pernah denger a.” Berdasarkan wawancara saya dengan Anak Terlantar Difa sebagai

berikut: "gak tahu a." Berdasarkan hasil wawancara saya dengan Anak Terlantar rizki sebagai berikut: "gak tahu kak." Berdasarkan hasil wawancara saya dengan anak terlantar aris sebagai berikut: "gak tahu a." Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi belum gencar dilakukan sehingga masih banyak Anak Terlantar yang belum mengetahui peran Dinas Sosial sehingga belum sebagai pelaksana tugas dari aturan Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, yaitu dimana sebagai individu adalah dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bu Dyah selaku kepala bidang rehabilitasi sosial: "program kami terkait rehabilitasi anak tentunya ada, berupa pelatihan dan pembinaan. Adapun Anak Terlantar yang sudah mendekati umur dewasa dan berorientasi mendapatkan uang, kami arahkan ke pelatihan keterampilan di Palimanan selama 6 bulan disana dan pelatihan yang mereka dapat sesuai dengan yang mereka pilih, seperti perbengkelan, steam kendaraan, menjahit dan lain lain. Yang kemudian setelah mendapatkan pelatihan disana kami berikan modal berupa barang sesuai pilihan pelatihan keterampilan mereka. Adapun Anak Terlantar yang masih kecil kami upayakan untuk mengenyam pendidikan kembali, entah itu pendidikan formal ataupun non formal. Dan juga biasanya Anak Terlantar yang masih sangat kecil kami kembalikan ke orangtuanya agar kemudian diasuh dalam didikan orangtuanya. Adapun rencana kami terkait rumah singgah sedang kami ajukan agar nantinya bimbingan bisa dilakukan secara mandiri di kabupaten karawang tanpa harus mengirim mereka ke luar daerah."

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Damanhuri selaku kepala seksi rehabilitasi anak terlantar dan lanjut usia sebagai berikut: "program kami ada rumah singgah hanya saja belum terlaksana karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, tapi program yang lain seperti pelatihan dan juga bimbingan moral berjalan, kalau yang pelatihan keterampilan kami kirimkan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial di Palimanan dan mereka bisa memilih program pelatihan yang mereka inginkan, hanya saja ini terkendala juga dari Anak Terlantar nya karena kami pernah mengirimkan Anak terlantar kesana berjumlah 8 orang tapi mereka tidak mengikuti sampai selesai alias kabur dari lokasi pelatihan, ini yang menjadi kendala di kami. Ada juga untuk anak terlantar yang lain kami memberikan bimbingan moral dan juga kami bujuk agar mau bersekolah kembali hanya saja sedikit yang benar benar mau dan berakhir terjun ke jalanan kembali. Artinya dari banyaknya kendala yang kami alami, kami juga membutuhkan peran dari berbagi elemen seperti tokoh masyarakat dan pemuda agar program ini bisa berjalan sukses."

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak terlantar chandrabyu sebagai berikut: "gak tahu a, belum pernah dengar juga." Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak terlantar rafa sebagai berikut: "gak tahu a." Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak terlantar rifki sebagai berikut: "gak tahu a." Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anak terlantar aris sebagai berikut: "gak tahu a." Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para informan, peneliti menyimpulkan masih kurangnya sosialisasi terkait program pelatihan dan pembinaan sehingga program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang belum bisa mencapai target yang diinginkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang itu sendiri.

Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Dalam penelitian ini, perilaku Dinas

Sosial Kabupaten Karawang sangat penting dan berpengaruh dalam rehabilitasi sosial Anak Terlantar. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Dyah selaku kepala bidang Rehabilitasi Sosial sebagai berikut: “anak terlantar disebabkan banyak faktor, ada yang disebabkan karena faktor intern dan ekstern. Faktor intern biasanya disebabkan oleh keluarga yang tidak harmonis, kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka mencari uang sehingga mereka terjun ke jalanan untuk mengamen dan mengemis, adapun faktor ekstern yaitu lingkungan pergaulan biasanya di ajak oleh temannya yang sudah lebih dulu terjun di jalanan. Dengan berbagai faktor ini tentunya kami harus meangkul mereka dengan cara yang berbeda beda juga. Dan jumlah anak Terlantar ini sendiri fluktuatif karena kebiasaan mereka yang berpindah pindah. Misalkan dari kabupaten karawang ke kabupaten sekitarnya, ataupun sebaliknya. Karena kebiasaan mereka yang berpindah pindah ini yang menyebabkan kami kesulitan mendata jumlah mereka serta melakukan pembinaan kepada mereka.”

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Damanhuri selaku kepala seksi rehabilitasi anak terlantar dan lanjut usia sebagai berikut: “Rehabilitasi yang kita berikan berupa bimbingan kewirausahaan bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Palimanan serta bantuan berupa barang agar nantinya setelah pelatihan mereka dapat membuka usahanya sendiri. Dan untuk bimbingan yang lain biasanya kami melakukan pendekatan agar Anak Terlantar ini mau mengenyam pendidikan kembali. Kami juga sedang mengajukan Rumah Singgah hanya saja belum terealisasi karena terkendala anggaran. Kami berharap juga peran dari elemen lain agar program kami bisa tersampaikan kepada Anak terlantar sehingga bisa mencapai target yang kita inginkan bersama.”

## KESIMPULAN

Peranan Dinas Sosial Dalam Upaya Dalam Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di Kabupaten Karawang masih belum optimal dalam menjalankan norma atau aturan mengenai peraturan Bupati Karawang Nomor 54 tahun 2019 Tentang penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial terlihat belum disosialisasikan dengan baik sehingga belum terealisasi dengan baik. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang merupakan konsep dalam upaya Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di Kabupaten Karawang belum terealisasi dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada Anak Terlantar terkait program pembinaan dan pelatihan sehingga jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Karawang masih banyak. Perilaku dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang Dalam Upaya Rehabilitasi Sosial Anak terlantar di Kabupaten Karawang. Terlihat bahwa kampanye mengenai program dari Dinas Sosial Kabupaten Karawang informasinya belum menyeluruh, sehingga masih banyak Anak Terlantar yang belum mendapatkan pembinaan atau pelatihan dari program Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers Edisi Revisi
- Sugiyono. 2017. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial